



# LAPORAN KINERJA DIREKTORAT KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN TRIWULAN I 2024



DIREKTORAT KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan sehingga menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, April 2024  
**Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan**  
  
Tingga Hermawan, S.Pi, M.Si

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR GAMBAR .....	4
DAFTAR TABEL .....	5
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	8
BAB I. PENDAHULUAN .....	12
1.1. Latar Belakang .....	12
1.2. Maksud dan Tujuan .....	13
1.3. Tugas dan Fungsi .....	13
a. Sumber Daya Manusia .....	14
b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya .....	15
c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja .....	16
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .....	17
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Budidaya .....	17
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024 .....	18
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	21
3.2. Analisis Capaian Kinerja .....	24
<b>SS.1. Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan .....</b>	<b>24</b>
IKU 1 Tenaga kerja yang terlibat di bidang kawasan dan kesehatan ikan (orang) .....	24
<b>SS.2. Meningkatnya Kawasan Perikanan Budidaya yang direvitalisasi .....</b>	<b>25</b>
IKU 2 Kluster tambak yang siap operasional (Kluster) .....	25
IKU 3 Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan) .....	27
IKU.4 Kawasan perikanan budidaya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan) .....	29
<b>SS.3. Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan .....</b>	<b>30</b>
IKU.5 Persentase sarana kawasan budidaya yang dimanfaatkan masyarakat (%) .....	30

IKU.6 Saluran irigasi tambak yang direhabilitasi (paket).....	32
<b>SS 4. Meningkatnya kualitas pengendalian kesehatan ikan.....</b>	<b>33</b>
IKU 7. Presentase NSPK bidang kesehatan ikan yang disusun (%) .....	33
IKU 8. Tingkat kualitas implementasi <i>National Residu Monitoring Plan</i> (%).....	35
IKU 9. Indeks pengendalian penyakit ikan (skala).....	38
IKU 10. Persentase bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%) .....	41
<b>SS.5. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan KesehatanIkan.....</b>	<b>41</b>
IKM.11. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) .....	44
IKM. 12. Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai) .....	44
IKM.13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) .....	46
IKM.14. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) .....	47
IKM.15. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) .....	48
IKM.16. Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) .....	49
IKM.17. Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%).....	53
IKM.18. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%) .....	54
IKM.20. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)...55	
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Pasca Transformasi Jabatan Fungsional Tahun 2023 .....	14
Gambar 2. Potensi Perikanan Budi Daya .....	15
Gambar 3. Pendekatan Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya 2020-2024 .....	17
Gambar 4. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi Daya 2020-2024 .....	18
Gambar 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2024.....	19
Gambar 6. <i>Screenshoot</i> NPSS Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan pada Kinerja Triwulan I Tahun 2024 .....	20
Gambar 7. Formulasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN .....	44

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah SDM berdasarkan jenjang pendidikan di setiap unit organisasi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2024 .....	12
Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024 .....	19
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang) Triwulan I Tahun 2024 .....	22
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Kluster tambak yang siap operasional(Kluster) Triwulan I Tahun 2024.....	23
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan) Triwulan I Tahun 2024.....	26
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan irigasi (Kawasan) Triwulan I Tahun 2024 .....	27
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%) Triwulan I Tahun 2024 .....	29
Tabel 8. Capaian Indikator Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (paket) Triwulan I Tahun 2024 .....	30
Tabel 9. Poklina dan Paket PITAP Tahun Anggaran 2024.....	31
Tabel 10. Rincian Target Jumlah Dokumen NSPK Bidang Kesehatan Ikan Tahun 2024.....	32
Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%) .....	32
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%) .....	33
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi National Residue Monitoring Plan (NRMP) (%) Triwulan I Tahun 2024 .....	34
Tabel 14. Rincian target dan realisasi sampel monitoring residu di 26 Provinsi pada Triwulan I Tahun 2024	35
Tabel 15. Skala Penentuan Indeks Pengendalian Penyakit Ikan (Skala) .....	36
Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Indeks serangan penyakit ikan (Skala) Triwulan I Tahun 2024 .....	37
Tabel 17. Rincian Target dan Realisasi Sampel Monitoring Penyakit Ikan di 34 Provinsi pada Triwulan I Tahun 2024 .....	37
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Persentase Bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%) Triwulan I Tahun 2024.....	40
Tabel 18. Rincian target dan realisasi sampel surveilan resistensi antimikroba Triwulan I Tahun 2024 di 15 UPT-DJPB.....	40
Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan I Tahun 2024 .....	43
Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai) Triwulan I Tahun 2024.....	44
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan I Tahun 2024 .....	45
Tabel 23. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Eselon II Ditjen Perikanan	

Budi Daya Triwulan I Tahun 2024 .....	45
Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan I Tahun 2024.....	46
Tabel 25. Capaian Indikator Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan I Tahun 2024.....	47
Tabel 26. Capaian Indikator Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan I Tahun 2024 .....	48
Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Kawasan dan .....	49
Tabel 28. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024..	49
Tabel 29. Rekapitulasi Ketidakhadiran Pegawai Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024 .....	50
Tabel 30. Rincian Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Triwulan I Tahun 2024.....	50
Tabel 31. Data Transaksi Persediaan Untuk Periode Triwulan I Tahun 2024 .....	51
Tabel 32. Layanan Rapat Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024.....	52
Tabel 33. Capaian Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) Triwulan I Tahun 2024 .....	53
Tabel 34. Capaian Indikator Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (Lokasi) Triwulan I Tahun 2024.....	54
Tabel 35. Capaian Indikator Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024.....	55
Tabel 36. Capaian Indikator Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024.....	55

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja (LKj) Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024 merupakan hasil penilaian dan evaluasi capaian kinerja dan sasaran untuk mengukur pencapaian kinerja dan sasaran selama Triwulan I Tahun 2024, yang juga merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan.

Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai turunan dari perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Berikut rincian capaian Indikator Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024:

a) Terdapat 3 (tiga) Indikator kinerja dari 1 (satu) Sasaran Strategi yang capaiannya telah melampaui target tahunan yang ditetapkan, yaitu:

**SS5 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan**, dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: (i) Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%), (ii) Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) dan (iii) Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%).

b) Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja dari 2 (dua) Sasaran Strategi yang capaiannya di bawah target tahunan yang ditetapkan, yaitu:

**SS4. Meningkatkan kualitas pengendalian kesehatan ikan** dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Persentase NSPK bidang kesehatan ikan yang disusun.

**SS5 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan**, dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan

c) Terdapat 14 (empat belas) indikator kinerja dari 5 (lima) Sasaran Strategi yang capaiannya belum dapat diukur pada triwulan I, yaitu:

**SS1. Ekonomi Sektor Perikanan Budi daya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan** dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Tenaga kerja yang terlibat di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (Orang).

**SS2. Meningkatkan kawasan perikanan budi daya yang Direvitalisasi** dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : (i) Kluster tambak yang siap operasional (Kluster), (ii) Kawasan budidaya yang direncanakan saluran irigasinya (kawasan) dan (iii) kawasan perikanan budidaya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (kawasan).

**SS3. Meningkatkan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan**, dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : (i) Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan masyarakat (%) dan (ii) Saluran irigasi tambak yang Direhabilitasi (%).

**SS4. Meningkatkan kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan**, dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu: (i) Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP)

(%), (ii) Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (%), (iii) Indeks Serangan Penyakit Ikan (Skala) dan (iv) Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resisten terhadap Antimikroba (%)

**SS5. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasandan Kesehatan Ikan,** dengan 4 (empat) indikator kinerja) yaitu : (i) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen), (ii) Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai), (iii) Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup Direktorat Kawasandan Kesehatan Ikan (%), (iv) Persentase PelakuUsaha Budi daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) dan (v) Data Geospasial yangTerintegrasi bidangPerikanan Budi Daya (%).

Berdasarkan capaian di atas, diketahui bahwa 15,79% Indikator Kinerja telah melampaui target tahunan yang ditetapkan, 10,52% di bawah target yang ditetapkan dan 73,68% Indikator Kinerja yang capaiannya belum dapat diukur pada Triwulan I. Sehubungan dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024 maka perolehan Nilai Pengukuran Sasaran Strategi (NPSS) mencapai kategori “Istimewa”, upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja, antara lain:

1. **IKU 7. Persentase NSPK bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (%)**, telah diselesaikannya Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya yang mendukung kegiatan residu dan AMR sebanyak 3 dokumen;
2. **IKM 12. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)**, telah dilakukan penyelesaian sebagian temuan Inspektorat Jenderal dan masih terdapat beberapa kegiatan terkait dengan hasil review pembangunana BUBK, PITAP dan ISF yang belum seluruhnya tuntas ditindaklanjuti;
3. **IKM 14. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)** telah disampaikannya penyebarluasan informasi menggunakan platform *Portal Collaboration Office* secara rutin.
4. **IKM 16. Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)**, telah dilakukan upaya peningkatan layanan ketatausahaan di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan
5. **IKM 17. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)**, telah dilakukan upaya dalam percepatan penyerapan anggaran terutama pada kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat.

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan perikanan budi daya tahun 2020-2024 perlu memiliki perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017, perencanaan dan penganggaran nasional harus dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial berdasarkan prinsip *money follows program*. Berdasar pada isu dan permasalahan yang masih dihadapi, Ditjen Perikanan Budi Daya perlu me-reformulasi kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya perikanan budi daya yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, bukan lagi semata pada peningkatan produksi saja. Penjabaran pelaksanaan pembangunan perikanan budi daya, lebih lanjut dituangkan dalam buku Rencana Strategi (RENSTRA) Perikanan Budi Daya 2020 - 2024.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budi daya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam 4 (empat) perspektif dengan masing-masing IKU seperti yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budi daya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan telah menetapkan target kinerja tahun 2024, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun, kemudian dituangkan dalam LKj Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan

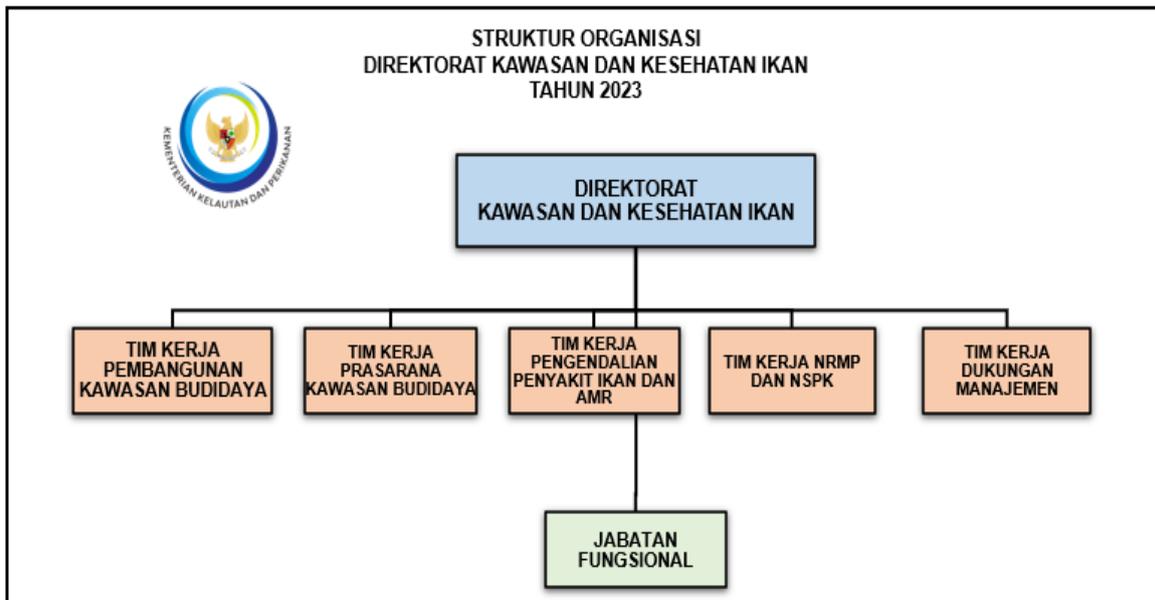
pengelolaan anggaran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan. Adapun tujuan penyusunan LKJ Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan selama Triwulan I tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kebijakan perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya.

### **1.3. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017, maka Tugas Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana kawasan, penataan kawasan, hama dan penyakit ikan, residu dan laboratorium.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 5) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; dan
- 6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.



**Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan**

**a. Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 55 (lima puluh lima) orang, sebagaimana terdapat pada Tabel 1. Kualifikasi sumberdaya di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan terdiri dari pendidikan S3 sebanyak 1,96%, S2 sebanyak 17,64%, S1 sebanyak 74,51%, D3 sebanyak 1,96%, SMA sebanyak 1,96% dan SMP sebanyak 1,96%.

**Tabel 1. Jumlah SDM berdasarkan jenjang pendidikan di setiap unit organisasi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2024**

No.	Nama Organisasi	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
1	Direktur	-	1	-	-	-	-	1
2	Tim Kerja Pembangunan Kawasan Budi Daya	-	3	9	-	-	-	12
3	Tim Kerja Prasarana Kawasan Budi Daya	-	2	7	-	-	-	9
4	Tim Kerja Pengendalian Penyakit Ikan dan AMR	-	2	7	-	-	-	9
5	Tim Kerja NRMP dan NSPK	-	3	4	-	-	-	7
6	Tim Kerja Dukungan Manajemen	-	-	4	2	6	-	12
7	Pengawas Perikanan Utama	1	-	-	-	-	-	1
<b>J U M L A H</b>		<b>1</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>51</b>

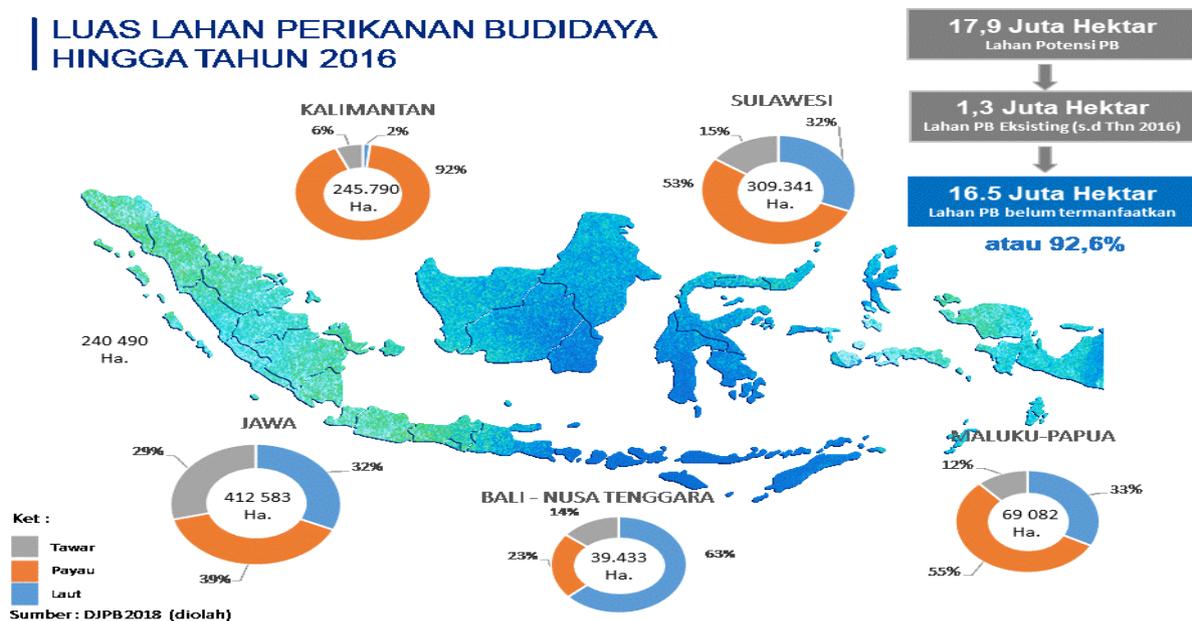
Keseluruhan jumlah pegawai di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan mencapai 48 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil 40 orang,
- b. Pegawai PPPK 4 orang dan
- c. Pegawai Tenaga Kontrak 7 orang.

Pegawai tenaga kontrak di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan tersebar di Timja Dukungan Manajemen sebanyak 3 (tiga) orang, Timja Pembangunan Kawasan Budi Daya 2 (dua) orang, dan Tim Kerja Prasarana Kawasan Budi Daya sebanyak 2 (dua) orang.

### b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

Potensi lahan perikanan budi daya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi budidaya air tawar 2,83 juta ha, budi daya air payau 2,96 juta ha dan budi daya laut 12,12 juta Ha (sumber: Review Masterplan Perikanan Budi daya Tahun 2014). Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 11,32 persen untuk budi daya air tawar, 22,74 persen pada budi daya air payau dan 2,28 persen untuk budi daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budi daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budi daya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budi daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.



**Gambar 2. Potensi Perikanan Budi daya**

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan budi daya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang dihadapi meliputi: (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas, (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk

pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budi daya, (v) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budi daya; (vi) manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vii) implementasi cara berbudidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan mandiri) belum optimal diimplementasikan oleh pelaku usaha perikanan budi daya; dan kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budi daya secara efisien.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budi daya meliputi: (i) tidak adanya kepastian ruang untuk usaha perikanan budi daya, (ii) adanya asimetrik regulasi dan perizinan inter dan intra sektoral yang menghambat pengembangan usaha perikanan budi daya, (iii) adanya perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, dan (iv) belum adanya harmonisasi kebijakan, program dan anggaran antara pusat dan daerah serta inter dan intra sektoral.

### c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

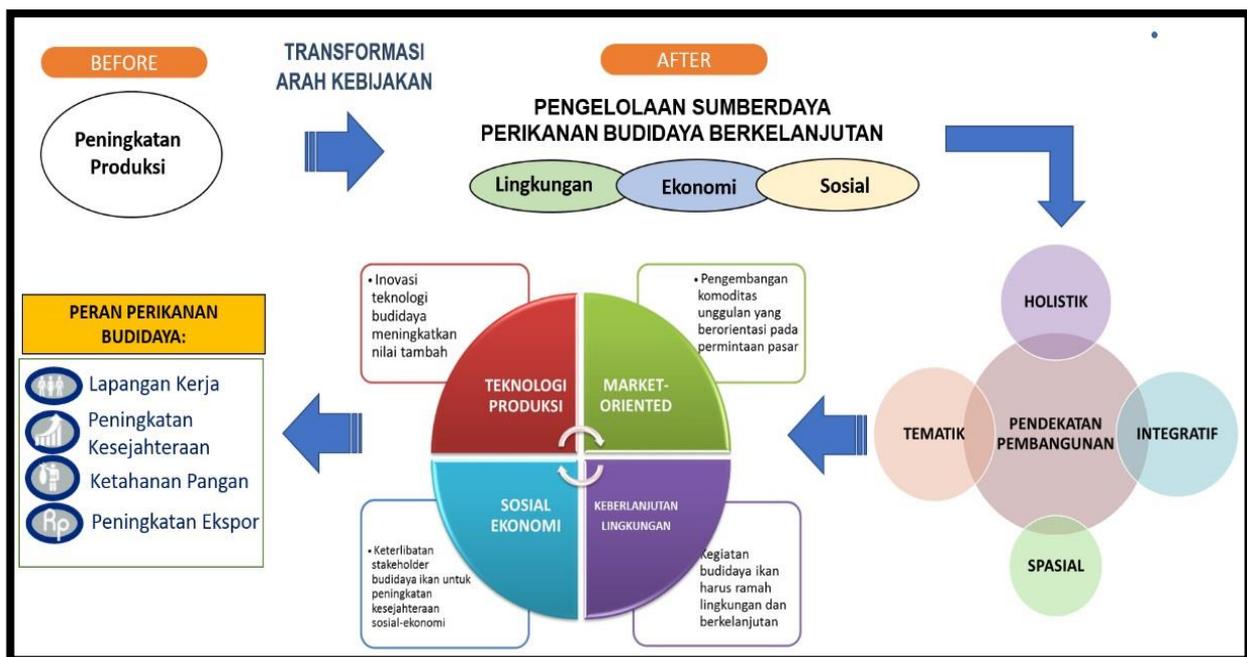
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024 selama kurun waktu Januari – Maret 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, keragaan sumber daya manusia (SDM), potensi dan permasalahan pembangunan perikanan budidaya serta sistematika penyajian laporan kinerja.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini menyajikan tentang Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini menyajikan evaluasi dan analisis kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I tahun 2024. Dalam bab ini jugadisampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang capaian, permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

## BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Budi Daya

Berdasarkan Rancangan Teknokratis Renstra Perikanan Budi Daya 2020-2024, Ditjen Perikanan Budi Daya melaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budi daya yang Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perikanan budi daya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Fokus kebijakan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budi daya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budi daya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budi daya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 2. Pendekatan Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya 2020-2024

Kebijakan pembangunan perikanan budi daya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi, meliputi Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan, Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya, dan Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan. Kelompok strategi tersebut kemudian masing-masing dijabarkan dalam strategi, sebagaimana disajikan pada Gambar berikut:



**Gambar 3. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi Daya 2020-2024**

## 2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	1. Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan (Orang)	680
2.	Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi	2. Kluster Tambak yang Siap Operasional (Kluster)	9
		3. Kawasan budidaya yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan)	1
		4. Kawasan Perikanan Budi Daya yang Mendapat Kemudahan Pengairan/ Irigasi (Kawasan)	8
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	5. Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang dimanfaatkan Masyarakat (%)	75
		6. Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (Paket)	10
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan	7. Tingkat Kualitas Implementasi <i>National Residue Monitoring Plan</i> (NRMP) (Persen)	94
		8. Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (Persen)	75
		9. Indeks Serangan Penyakit Ikan (Skala)	2
		10. Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan terhadap Antimikroba (Persen)	35
5.	Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	85
		12. Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai)	82
		13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	80
		14. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	
		15. Tingkat efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	80
		16. Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	80
		17. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91
		18. Data Geospasial yang Terintegrasi Bidang Perikanan Budi Daya (Lokasi)	1
		19. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	98

**Data Anggaran :**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	429,050,000,000
2.	Dukungan Manajemen Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	678,640,000
<b>Total Anggaran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2024</b>		<b>429,728,640,000,-</b>

Jakarta, Februari 2024

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama  
Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan

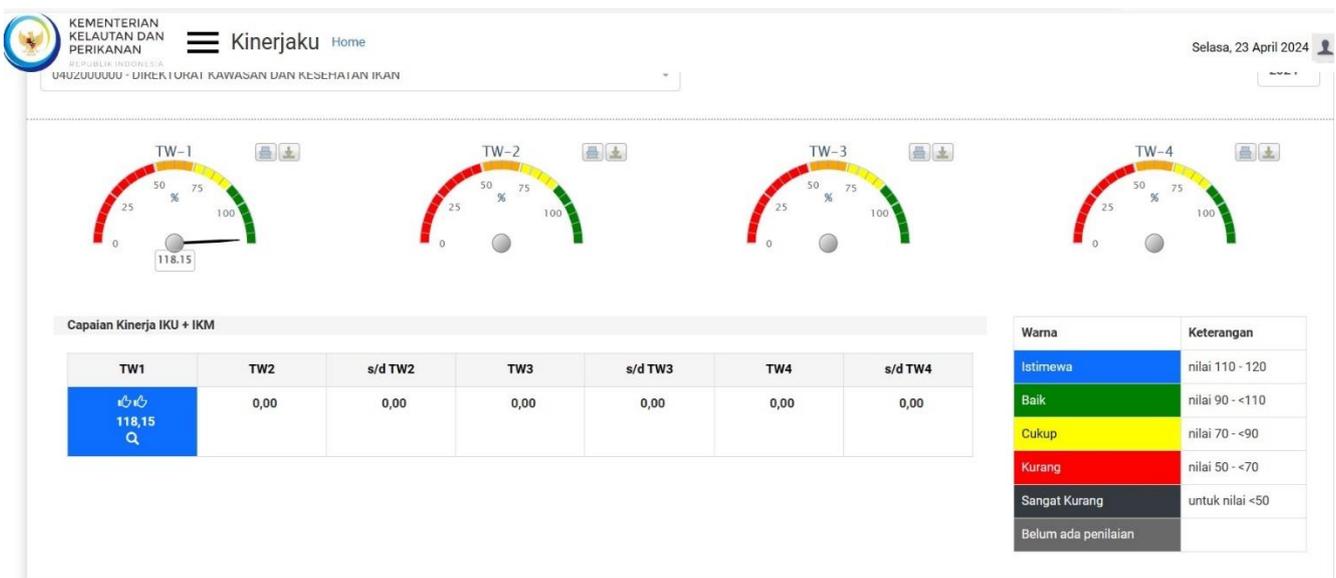
  
Tb. Haeru Rahayu

  
Tinggal Hermawan

**Gambar 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2024**

## 2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implementasi Aplikasi "Kinerjaku" dimana aplikasi ini merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 6. Screenshot NPSS Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan pada Kinerjaku Triwulan I Tahun 2024

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan kawasan dan kesehatan ikan pada tahun 2023 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya menitikberatkan pada 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budi Daya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” terdapat 13 (tiga belas) indikator yang dapat diukur capaiannya secara tahunan, 1 (satu) indikator diukur capaiannya secara semesteran dan 5 (lima) indikator lainnya diukur secara triwulan. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan I	%	Peng-Hitungan
1	Ekonomi Sektor Perikanan Budi daya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	1	Tenaga kerja yang terlibat di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (Orang)	680	0	0	Tahunan
2	Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang Direvitalisasi	2	Kluster tambak yang siap operasional (Kluster)	9	0	0	Tahunan
		3	Kawasan budi daya yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan)	1	0	0	Tahunan
		4	Kawasan Perikanan Budi Daya yang Mendapat Kemudahan Pengairan/Irigasi (Kawasan)	8	0	0	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan I	%	Peng-Hitungan
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	5	Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan masyarakat (%)	75	0	0	Tahunan
		6	Saluran irigasi tambak yang Direhabilitasi (%)	10	0	0	Tahunan
4	Meningkatnya kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan	7	Tingkat Kualitas Implementasi <i>National Residue Monitoring Plan</i> (NRMP) (%)	94	0	0	Tahunan
		8	Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (%)	75	42,86	57,15	Triwulan
		9	Indeks Serangan Penyakit Ikan (Skala)	2	0	0	Tahunan
		10	Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resisten terhadap Antimikroba (%)	35	0	0	Tahunan
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	85	0	0	Semesteran
		12	Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai)	82	0	0	Tahunan
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)	80	82,61	103,26	Triwulanan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan I	%	Peng-Hitungan
		14	Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)	94	133,33	141,84	Triwulan
		15	Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)	80	0	0	Tahunan
		16	Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)	80	99,32	124,15	Triwulan
		17	Persentase Pelaku Usaha Budi daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%)	91	0	0	Tahunan
		18	Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%)	1	0	0	Tahunan
		19	Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	98	3,86	3,93	Triwulan

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. Secara rinci analisis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### SS.1. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan

Sasaran Strategis Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu:

##### **IKU 1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (Orang)**

Indikator Tenaga Kerja yang terlibat di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang) didefinisikan Jumlah tenaga kerja langsung yang terlibat dalam kegiatan kawasan dan kesehatan ikan sebanyak 680 orang, yang meliputi: Excavator sebanyak 480 orang dan (b) PITAP sebanyak 200 orang.

Penanggung Jawab Indikator Kinerja Tenaga Kerja yang terlibat di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang) berada di Tim Kerja Pembangunan Kawasan Budi Daya dan Tim Kerja Prasarana Kawasan Budi Daya. Pengukuran penghitungan indikator kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang) dihitung berdasarkan tenaga Kerja yang terlibat langsung pada kegiatan di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang), dengan kriteria sebagai berikut:

- Dalam mengoperasikan 1 unit excavator membutuhkan 5 orang tenaga kerja terdiri dari 2 orang pengelola dari kelompok, 1 orang operator, 1 orang mekanik, 1 orang penjaga malam. Sehingga untuk 96 unit excavator melibatkan tenaga kerja sebanyak 480 orang (96 unit x 5 orang). Untuk pengelola, operator, dan penjaga malam bekerja selama alat beroperasi, sedangkan mekanik bekerja saat excavator sedang di service/perbaikan.
- 1 paket PITAP melibatkan kelompok dimana 1 kelompok minimal terdiri dari 20 orang. Sehingga untuk 10 paket PITAP melibatkan tenaga kerja sebanyak 200 orang (10 paket x 20 orang).

**Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang) Triwulan I Tahun 2024**

Nama SS : Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang)								
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020 - 2024
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	-	680	-	-

Pengukuran Indikator Kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang) Triwulan I Tahun 2024 dilakukan secara Tahunan, sehingga capaiannya baru diketahui pada akhir Tahun. Pada triwulan I, capaian indikator kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Kawasan dan Kesehatan ikan (orang) belum terealisasi disebabkan pelaksanaan bantuan sarana kawasan budidaya, dan PITAP masih dalam proses pengerjaan.

## SS.2. Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi

Sasaran Strategis Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:

### IKU 2. Kluster tambak yang siap operasional (Kluster)

Kluster tambak yang siap operasional meliputi pembangunan kluster tambak udang dan revitalisasi tambak bandeng dengan kriteria sebagai berikut:

- Kluster tambak udang siap operasional merupakan pembangunan petakan tambak udang yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana budidaya, seperti jaringan listrik, kincir, dan plastik pelapis tambak (lining).
- Sedangkan kluster tambak bandeng siap operasional merupakan revitalisasi kawasan tambak bandeng yang difasilitasi dengan sarana produksi berupa benih dan pakan ikan.

Target indikator kinerja Kluster tambak yang siap operasional, terdiri dari : (a) pembangunan kluster tambak udang, dengan target 2 kluster dan (b) revitalisasi kluster tambak bandeng, dengan target 7 kluster. Jumlah usaha budidaya tambak dengan konsep kawasan tambak udang dan bandeng sebanyak 9 kluster, terdiri dari : 2 kluster tambak udang dan 7 kluster tambak bandeng dikerjakan oleh UPT DJPB dengan rincian : **(a) BPBAP Situbondo:** 1 tambak udang di Kabupaten Pangandaran dan 1 tambak bandeng di Kabupaten Gresik; **(b) BBPBAP Jepara:** 1 tambak udang di Kabupaten Langkat Sumatera Utara dan 4 tambak bandeng di Kabupaten Tangerang/Mauk; **(c) BLUUPB Karawang:** 1 tambak bandeng di Kabupaten Karawang; **(d) BPBAP Takalar:** 1 tambak bandeng di Kabupaten Pangkep. Penghitungan capaian Indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah kluster tambak udang dan bandeng siap operasional merujuk pada definisi siap operasional yang pengukurannya dilakukan akhir tahun.

**Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Kluster tambak yang siap operasional (Kluster) Triwulan I Tahun 2024**

Nama SS: Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang direvitalisasi								
Nama Indikator: Kluster tambak yang siap operasional (Kluster)								
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020-2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	-	9	-	-

Pada triwulan I, telah dilakukan upaya dalam mencapai indikator kinerja Kluster tambak yang siap operasional (Kluster) Triwulan I Tahun 2024, di masing-masing kluster yaitu :

**1) Kluster Tambak Udang :**

- a. Penyusunan juknis kluster tambak udang Nomor 384 tahun 2023 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan klaster budidaya udang tahun anggaran 2024;
- b. Penetapan lokasi pada klaster tambak udang tahun 2024 berada di kabupaten Langkat dan Kabupaten Pangandaran, dengan rincian :
  - (i) Pada Kabupaten Langkat dengan No SK Penerima 602/BBPBAP/PB.410/II/2024, sedangkan
  - (ii) pada Kabupaten Pangandaran SK Lokasi pada nomor 451.BPBAPS.PPK/OT.220/III/2024.
- c. Pendampingan pelaksanaan pembangunan klaster tambak udang yang telah dilakukan di masing-masing lokasi, yaitu:
  - (i) **Kabupaten Langkat** : identifikasi, verifikasi, perencanaan konstruksi, penetapan lokasi, dan sosialisasi (PJ Bupati Langkat dan forkopinda serta di masyarakat desa). Penetapan lokasi penerima di Kabupaten Langkat yaitu Pokdakan Anak Langkat Bertuah, Ds. Pasarawa, Kec. Gebang, Langkat, Sumatera Utara.
  - (ii) **Kabupaten Pangandaran** : verifikasi lokasi dan penetapan kelompok penerima yaitu Kelompok Vannamei Putra Pamotan, Dsn Ciawitali, Ds. Pamotan, Kec. Kalipuncang, Jawa Barat.

**2) Kluster Tambak Bandeng :**

- a. Penyusunan juknis kluster tambak bandeng Nomor 382 tahun 2023 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan klaster budidaya bandeng tahun anggaran 2024;
- b. Penetapan lokasi tambak klaster bandeng melalui Keputusan Dirjen Perikanan Budi Daya nomor 18 tahun 2024, yang meliputi : kabupaten Tangerang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- c. Pendampingan pelaksanaan revitalisasi klaster tambak bandeng
  - (i) Satker BBPBAP Jepara sebagai pelaksana revitalisasi klaster tambak bandeng pada lokasi kabupaten Tangerang telah melaksanakan Identifikasi dan Verifikasi di lokasi tambak Mauk Ds. Lontar, Kec. Kemiri, Kab Tangerang Banten.
  - (ii) Satker BPBAP Situbondo sebagai pelaksana revitalisasi klaster tambak bandeng lokasi Kabupaten Gresik telah melakukan kegiatan : (a) penetapan lokasi penerima pada Kelompok Makmur Bahari, (b) penebaran benih bandeng di kluster bandeng Gresik, dan (c) barang bantuan telah diserahkan seperti pupuk, pakan, hapa, obat dan benih serta sosialisasi/bimtek dengan kelompok penerima.
  - (iii) Satker BLUPPB Karawang sebagai pelaksana revitalisasi klaster tambak bandeng di lokasi Kabupaten Karawang telah melakukan identifikasi lokasi dan penerima pada kelompok Mina Payau Mandiri dan Sukses Bersama.

(iv) Satker BPBAP Takalar sebagai pelaksana revitalisasi kluster tambak bandeng di lokasi Kabupaten Pangkep telah melakukan identifikasi dan penetapan lokasi pada kelompok Sunguminasa di Ds. Bontomanai Kec. Labakkang Kab. Pangkep.

Permasalahan dihadapi di lokasi pembangunan kluster udang yaitu : (i) kabupaten Langkat, ditemukannya kendala trafo listrik yang kemudian dapat diselesaikan dengan penambahan daya dan kendala saluran outlet dengan komitmen Pemda rehab saluran, (ii) kabupaten Pangandaran : pemenuhan dalam kebutuhan tanah pengurangan lahan yang diselesaikan melalui upaya koordinasi dengan dinas dan desa untuk pengambilan tanah urugan,

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada kluster tambak udang di masing-masing lokasi, yaitu : (i) **Kabupaten Langkat** yaitu persiapan alat berat, *land clearing lahan*, pemasangan trafo mendekasi kawasan kluster, serta kelengkapan perijinan pokdakan, (ii) **Kabupaten Pangandaran** yaitu penyusunan DED dan RAB kluster oleh tim perencana. Sedangkan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di masing-masing kluster bandeng, yaitu: (i) **Kabupaten Tangerang** : proses pengadaan dilaksanakan lebih cepat, pengadaan bahan/alat mesin melalui non tender (E Catalog dan pengadaan langsung) dan pelaksanaan konstruksi melalui Swakelola type 1 sehingga kegiatan budidaya kluster bandeng dapat dilakanakan sesuai teknis; (ii) **Kabupaten Gresik** : proses penggelondongan dan budidaya serta penyerahan sarana pompa air dan pendampingan teknis dari UPT serta penyuluh perikanan, (iii) **Kabupaten Karawang** : rencana tindak lanjut yaitu proses PBJ dan melakukan tahapan proses budidaya, (iv) **Kabupaten Pangkep** : menyelesaikan proses PBJ (kontrak) dan pendampingan pelaksanaan pekerjaan baik dari Tim Balai maupun dengan Konsultan pengawas.

Realisasi anggaran pada pada Triwulan I di masing-masing lokasi kluster adalah sebagai berikut :

- (a) pada kluster bandeng yang berada di Kabupaten Pangkep sebesar Rp.24.875.400 (3,55%) ,
- (b) pada kluster bandeng dan udang yang berada di kabupaten langkat dan Kabupaten Tangerang sebesar Rp.186.348.750 (3,39%);
- (c) Kabupaten Karawang belum ada realisasi sama sekali.
- (d) Kluster bandeng di Kabupaten Gresik terdapat realisasi Rp.661.874.100 (94,55%) dan
- (e) kluster udang di kabupaten Pangandaran terdapat realisasi Rp. 100.589.780 (1,83%).

### **IKU.3 Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan)**

Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan dengan luas minimal 10 Ha (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 55 Tahun 2020). Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya merupakan lokasi yang direncanakan akan dilakukan perbaikan terhadap sistem pengelolaan air guna mendukung peningkatan perikanan budi daya. Perencanaan terhadap perbaikan sistem tata air tambak dalam pembangunan kawasan budi daya perikanan mengacu pada rencana *Detail Engineering Design* (DED) kawasan tambak.

Cara pengukuran Indikator kinerja tersebut dilakukan dengan menghitung banyaknya

kawasan budi daya udang yang akan direncanakan saluran irigasinya. Indikator kinerja Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan) merupakan indikator yang baru dimunculkan pada Tahun 2024 dan pengukurannya dilakukan secara Tahunan. Perolehan sumber data terhadap capaian Indikator Kinerja tersebut berasal dari Tim kerja Prasarana Kawasan Budi daya.

**Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan) Triwulan I Tahun 2024**

Nama SS: Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang direvitalisasi								
Nama Indikator: Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan)								
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target Renstra 2020 -2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020-2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	-	1	-	-

Pada Triwulan I untuk Pekerjaan Penyusunan DED Kawasan Tambak Paket I telah dilakukan beberapa hal, antara lain:

- a. Telah disusunnya dan ditetapkannya Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan nomor 52/DJPB.2/PB.220/I/2024 Tentang Tim Pembahas Penyusunan DED Kawasan Tambak Tahun Anggaran 2024 tanggal 3 Januari 2024;
- b. Telah dilakukan penyusunan Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Penyusunan DED Kawasan Tambak berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS serta Draft Rancangan Kontrak. Dokumen Pengadaan ini telah disampaikan kepada Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa melalui Nota Dinas Nomor 38/DJPB.2/PB.220/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 untuk dapat dilanjutkan dengan metode lelang umum.
- c. Telah disusunnya dan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Lokasi Kegiatan Penyusunan Detail Engineering Design Kawasan Tambak Tahun Anggaran 2024 tanggal 8 Januari 2024;
- d. Telah dilakukannya koordinasi terkait dengan lokasi prioritas pekerjaan pada tanggal 25 Januari 2024 antara Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu dan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan.
- e. Menerima Nota Dinas dari UKPBJ KKP Nomor 321/PBJ.4.2/PL,460/II/2024 tanggal 27 Februari, dimana dijelaskan bahwa pemenang lelang adalah PT. Sapta Adhi Pratama dengan nilai klarifikasi dan negosiasi sebesar Rp. 1.116.819.840,00.
- f. Telah dilakukan Persiapan Penunjukkan Pemenang Barang/Jasa dan menerbitkan Surat Penunjukkan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) untuk Pekerjaan Penyusunan DED Kawasan

Tambak Paket I Nomor 2102/DJPB.2/PB.220/ SPPBJ/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 tanggal 4 Maret 2024;

- g. Dilanjutkan dengan ditandatanganinya Kontrak/Surat Perjanjian Nomor 2153/DJPB.2/K/III/2024 pada tanggal 5 Maret 2024 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 2154/DJPB.2/SPMK/III/2024 tanggal 5 Maret 2024;
- h. Telah dilakukan persiapan pelaksanaan kontrak pada tanggal 14 Maret 2024 di Kabupaten Indramayu;
- i. Penyedia telah menyerahkan draft Laporan Konsepsi Perancangan pada tanggal 25 Maret 2024.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah terdapatnya perubahan jam kerja terkait dengan adanya bulan Ramadhan serta padatnya waktu bagi tim pembahas pekerjaan sehingga rencana aksi/tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu percepatan dalam pembahasan Laporan Konsepsi Perancangan yang direncanakan akan dilakukan sebelum libur lebaran.

Realisasi anggaran sampai dengan TW I baru terserap 2,92% atau sebesar Rp. 43.838.200 dari pagu Rp1.500.000.000.

**IKU.4 Kawasan Perikanan Budi Daya Yang Mendapat Kemudahan Pengairan/Irigasi (Kawasan)**

Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (kawasan) merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan dengan luas minimal 10 Ha (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2020). Kawasan Perikanan Budi Daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi tambak tertier merupakan kawasan yang memperoleh dampak dari kegiatan PITAP.

Capaian indikator kinerja tersebut berupa dampak saluran dari hasil pekerjaan PITAP dengan target 8 kawasan. Penanggung jawab Indikator Kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan) berada di Tim Kerja Prasarana Kawasan Budi Daya.

**Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan) Triwulan I Tahun 2024**

Nama SS: Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang direvitalisasi								
Nama Indikator: Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan)								
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target Renstra 2020 -2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020-2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	-	8	-	-

Cara pengukuran Indikator kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan) dilakukan dengan menghitung jumlah Kawasan perikanan budi daya yang memperoleh dampak pengairan irigasi tambak tertier dari kegiatan

PITAP. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja tersebut baru dapat diketahui setelah pekerjaan PITAP telah selesai dilaksanakan.

Pada Triwulan I, capaian kegiatan masih 0 % yang disebabkan karena masih dalam tahap persiapan. Hal-hal yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan berupa:

1. Petunjuk Teknis Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif Tahun 2024, yang ditetapkan oleh Dirjen Perikanan Budi daya Nomor 385 Tahun 2023 Tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penetapan SK Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lokasi Penerima Bantuan PITAP TA. 2024 di 8 Kabupaten pada tanggal 2 Januari 2024;
3. Verifikasi calon penerima PITAP di 5 Provinsi, 8 Kabupaten yaitu di Kabupaten Tangerang, Subang, Cirebon, Pekalongan, Demak, Lamongan, Banyuwangi. Verifikasi ini dilaksanakan pada calon lokasi kawasan yang saluran irigasi tambaknya akan direhabilitasi sesuai dengan proposal awal yang diusulkan oleh POKLINA.
4. Penetapan SK PPK Satker Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Nomor 951/DJPB.2/SK/I/2024 tentang Penetapan Kelompok Pelaksana PITAP TA. 2024 pada tanggal 29 Januari 2024 sebanyak 8 kelompok dengan total 10 paket;
5. Penetapan SK PPK Satker Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Nomor 952/DJPB.2/SK/I/2024 tentang KPPT TA. 2024 pada tanggal 29 Januari 2024 sebanyak 8 orang;

Pembagian target 8 kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi, yaitu wilayah Banten sebanyak 1 kawasan, Jawa Barat sebanyak 2 kawasan, Jawa Tengah sebanyak 2 kawasan, Jawa Timur sebanyak 2 kawasan dan Sulawesi Selatan sebanyak 1 kawasan. Pemilihan calon lokasi kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan) sesuai dengan hasil kaji ulang yang dilaksanakan oleh POKLINA yang didampingi KPPT dan tenaga teknis Kabupaten.

### **SS.3. Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan**

Sasaran Strategis Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:

#### **IKU.5 Persentase sarana kawasan budi daya yang dimanfaatkan masyarakat (%)**

Indikator persentase sarana kawasan budi daya yang dimanfaatkan masyarakat (%) merupakan alat berat excavator yang telah dimanfaatkan masyarakat dalam mendukung kegiatan usaha budi daya perikanan agar meningkatkan produktifitas budi daya perikanan. Target indikator persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang dimanfaatkan (%) sebesar 75% yang diukur pada akhir tahun. Pada tahun 2024, nomenklatur Indikator tersebut merupakan penyesuaian dari Indikator kinerja tahun 2023 yaitu Persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan (%).

Cara penghitungan capaian indikator tersebut berdasarkan persentase realisasi bantuan excavator yang telah dimanfaatkan masyarakat dibandingkan dengan realisasi excavator yang telah diterima kelompok penerima. Capaian indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan laporan pemanfaatan excavator ke masyarakat dan Berita Acara Serah Terima Barang (Excavator). Jumlah bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan ke masyarakat pada Tahun 2024 berjumlah 96 unit. Pencapaian indikator sarana kawasan budidaya yang disalurkan berupa excavator menjadi tanggung jawab Tim Kerja Pembangunan Kawasan Budi Daya.

**Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%) Triwulan I Tahun 2024**

Nama SS : Meningkatkan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan								
Nama Indikator: Persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang dimanfaatkan masyarakat (%)								
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target Renstra 2020 - 2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	-	75	-	-

Capaian Indikator kinerja Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%) belum terealisasi pada Triwulan I, namun upaya yang telah dilakukan dalam mendorong capaian diatas yaitu : (i) Melakukan review petunjuk teknis alat berat excavator sebagai pedoman dalam penyaluran alat berat berupa excavator, (ii) Melakukan identifikasi CPCL pada 29 CPCL kemudian dari usulan tersebut sudah diminta kepada pengusul agar berkoordinasi dengan penyuluh perikanan dan dinas perikanan setempat untuk kelengkapan proposal sesuai dengan juknis bantuan alat berat excavator tahun 2024, (iii) kegiatan verifikasi dan penetapan CPCL sudah mencapai 8 kelompok penyaluran bantuan excavator kepada masyarakat, yaitu : Mina Sejahtera, Pokdakan Sejahtera, Pokdakan Waja Makmur, Pokdakan Tunas Muda, Pokdakan Windu Sejahtera, Pokdakan Al-Khoiriyah, Koperasi Syariah Al Mubarakah, dan Pokdakan Saman Lestari dan (iv) pengadaan alat berat excavator tahun 2024 melalui e-katalog yang ditindaklanjuti dengan surat pesanan excavator yang terdiri 80 unit standar merk Pindad dengan nomor 601/DJPB.2/SP/I/2024, 2 unit excavator standar merk Pindad dengan nomor 953/DJPB.2/SP/I/2024, 2 unit excavator mini merk Pindad dengan nomor 802/DJPB.2/SP/I/2024, dan 1 unit excavator mrk Komatsu long arm dengan nomor 1954/DJPB.2/SP/II/2024.

Kendala yang ditemui pada saat identifikasi CPCL yaitu pengumpulan proposal yang masih belum lengkap sehingga diperlukan koordinasi yang intens dengan Dinas Kabupaten terkait dan Tenaga Ahli untuk mendorong pencapaian target penyaluran bantuan excavator ke masyarakat. Pagu anggaran yang dialokasikan dalam penyaluran bantuan sarana berupa excavator ke masyarakat sebesar Rp 123.631.400.00 yang telah direalisasikan sebesar Rp512.232.500 atau 0.41%.

## IKU.6 Saluran irigasi tambak yang direhabilitasi (Paket)

Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) adalah penyelenggaraan rehabilitasi saluran irigasi tambak tersier berbasis peran serta kelompok pengelola irigasi perikanan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan rehabilitasi, dan operasional pemeliharaan. Target indikator persentase saluran irigasi tambak yang direhabilitasi sebesar 10 paket.

Cara penghitungan capaian indikator tersebut berdasarkan banyaknya saluran irigasi tambak tersier yang direhabilitasi dengan perolehan sumber data yang berasal dari Tim Kerja Prasarana Kawasan Budi Daya. Indikator Saluran irigasi tambak yang direhabilitasi (Paket) merupakan penyesuaian dari indikator yang ditetapkan Tahun 2023 yaitu : Persentase Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (%).

**Tabel 8. Capaian Indikator Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (paket) Triwulan I Tahun 2024**

Nama SS : Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan								
Nama Indikator: Saluran irigasi tambak yang direhabilitasi (Paket)								
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
-	-	-		-	-	10		

Pada Triwulan I, capaian kegiatan masih 0 % disebabkan karena masih dalam tahap persiapan. Hal-hal yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan berupa:

1. Petunjuk Teknis Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif Tahun 2024, yang ditetapkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya Nomor 385 Tahun 2023 Tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penetapan SK Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lokasi Penerima Bantuan PITAP TA. 2024 di 8 Kabupaten pada tanggal 2 Januari 2024;
3. Verifikasi calon penerima PITAP di 5 Provinsi, 8 Kabupaten yaitu di Kabupaten Tangerang, Subang, Cirebon, Pekalongan, Demak, Lamongan, Banyuwangi. Verifikasi ini dilaksanakan pada calon lokasi kawasan yang saluran irigasi tambaknya akan direhabilitasi sesuai dengan proposal awal yang diusulkan oleh POKLINA;
4. Penetapan SK PPK Satker Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Nomor 951/DJPB.2/SK/I/2024 tentang Penetapan Kelompok Pelaksana PITAP TA. 2024 pada tanggal 29 Januari 2024 sebanyak 8 kelompok dengan total 10 paket;
5. Penetapan SK PPK Satker Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Nomor 952/DJPB.2/SK/I/2024 tentang KPPT TA. 2024 pada tanggal 29 Januari 2024 sebanyak 8 orang.

**Tabel 9. Poklina dan Paket PITAP Tahun Anggaran 2024**

No.	Provinsi	Kabupaten	Poklina	Jumlah Paket
1	Banten	Tangerang	Banyu Bina Bersama	1
2	Jawa Barat	Subang	Tani Jaya	2
3	Jawa Barat	Cirebon	Kali Jaka	1
4	Jawa Tengah	Pekalongan	Kerto Mina Mandiri	1
5	Jawa Tengah	Demak	Sumber Rejeki	1
6	Jawa Timur	Lamongan	Sedulur Tani	1
7	Jawa Timur	Banyuwangi	Wringin Putih Makmur	2
8	Sulawesi Selatan	Maros	Julu Kana	1
<b>Jumlah</b>				<b>10</b>

6. Penandatanganan kontrak PITAP dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu tahap I pada Kabupaten Cirebon, Demak, dan Lamongan pada tanggal 16 Februari – 15 Mei 2024 sedangkan tahap ke II pada Kabupaten Tangerang, Subang, Pekalongan, Banyuwangi, Maros pada tanggal 29 Februari – 28 Mei 2024. Waktu pelaksanaan PITAP yaitu selama 90 hari.
7. Jumlah paket yang disalurkan sebanyak 10 Paket dengan anggaran per paket sebesar Rp. 170.000.000.
8. Hasil Evaluasi atas kegiatan PITAP 2024 yaitu telah dilaksanakan Pencairan Dana Tahap I sebesar 40 % dari nilai Kontrak serta penyelesaian pelaksanaan kegiatan fisik PITAP (rehabilitasi saluran tambak) sebesar 30 % ;
9. Rekomendasi yang dilaksanakan yaitu Koordinasi dengan Poklina, KPPT dan Tenaga Teknis untuk segera menyerahkan Laporan Tahap I untuk proses pencairan Dana Tahap II
10. Rencana tindak lanjut yaitu pendampingan progres pelaksanaan kegiatan fisik rehabilitasi saluran tambak melalui kunjungan ke lapangan maupun rapat dengan mengundang Poklinas, KPPT dan Tenaga Teknis

Hingga akhir triwulan I 2024, anggaran yang telah terserap dalam mencapai IKU Saluran irigasi tambak yang direhabilitasi (Paket) sebesar Rp. 959.255.200 dari pagu Rp. 2.500.000.000 atau 38,37 %.

#### SS.4. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan

Sasaran meningkatnya kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja, yaitu:

IKU 7. Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%)

Indikator kinerja Persentase NSPK di Kesehatan Ikan merupakan dokumen NSPK yang disusun oleh Tim Kerja NRMP dan NSPK yang meliputi Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia

dan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya yang dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan ikan. NSPK di bidang kesehatan ikan yang dimaksud yaitu NSPK di bidang residu dan bidang penyakit ikan dengan target tahunan yang ditetapkan sebesar 75%. Pengukuran Indikator tersebut dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kumulatif dengan target kumulatif dalam renstra dalam kurun waktu 2020-2024.

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru ditetapkan pada triwulan III Tahun 2023. Target dokumen NSPK yang akan dihasilkan pada Tahun 2024 sebanyak 7 dokumen bidang kesehatan ikan berupa Peraturan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dan dokumen RSNI bidang kesehatan ikan. Pengukuran capaian Indikator kinerja Persentase NSPK di Kesehatan Ikan yang disusun (%) dilakukan secara triwulanan. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 10. Rincian Target Jumlah Dokumen NSPK Bidang Kesehatan Ikan Tahun 2024**

No	NSPK	Target (dokumen)	Produk NSPK
1	Bidang Residu	6	Revisi Peraturan Menteri (1 dokumen), Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (2 dokumen), dan RSNI3 (3 dokumen)
2	Bidang Hama dan Penyakit Ikan	1	Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (1 dokumen)
	<b>Total</b>	<b>7</b>	

**Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%) Triwulan I Tahun 2024**

Nama SS : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (%)								
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Renstra 2020-2024 (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)						
29	42,86	147,79	-	-	-	75	57,15	-

Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%) Triwulan I Tahun 2024 terealisasi sebesar 147,79% yang diperoleh berdasarkan realisasi NSPK sebesar 42,86% dibandingkan dengan target triwulanan. Selanjutnya, secara realisasi jumlah NSPK yang telah disusun di bidang kesehatan ikan berjumlah 3 dokumen, yaitu :

- a. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya nomor 60 tahun 2024 tentang Laboratorium Acuan dan Laboratorium Pengujian Dalam Pelaksanaan Monitoring Residu Nasional Tahun 2024.

- b. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Tim Pengendalian Residu Nasional Tahun 2024.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Rencana Surveilans Resistensi Antimikroba Tahun 2024.

**Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%) Triwulan I Tahun 2024**

NO	NSPK	Target Tahunan	Produk NSPK	Target Triwulan I (Dokumen)	Target Triwulan I (%)	Realisasi Triwulan I (DOKUMEN)	Capaian Triwulan I (%)
1	Bidang Residu	6	Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, RSNI	1	29	2	<b>42.86</b>
2	Bidang Hama dan Penyakit Ikan	1	Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya	1		1	
	<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	

#### **IKU 8. Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%)**

Tingkat kualitas implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) merupakan proses evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian residu nasional yang bertujuan untuk mengukur kualitas terhadap kinerja implementasi terhadap NRMP. Pelaksana kegiatan NRMP berada di 26 Provinsi dengan obyek monitoring residu berupa komoditas bandeng, lele, nila, patin, dan udang dengan target sampel monitoring residu secara nasional berjumlah 4.000 sampel. Penanggung jawab indikator kinerja Tingkat Kualitas Implementasi NRMP berada di Tim kerja NRMP dan NSPK.

Pelaksana kegiatan monitoring residu melalui kegiatan pengambilan sampel hingga pengujian sampel di 26 Provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

Capaian diukur berdasarkan data yang disajikan di dalam Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu (SIMPR) dengan mengukur aspek kesesuaian, kepatuhan dan ketercapaian. Pengukuran dilakukan pada akhir tahun dengan melakukan penilaian terhadap 3 aspek, sebagai berikut:

1. **Aspek Kesesuaian (bobot 30%)**, yaitu evaluasi kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi:
  - Kesesuaian Target Sampel masing-masing Provinsi (Implementasi – dokumen NRMP)

- Kesesuaian Target Lokasi monitoring residu pada unit pembesaran dan pembenihan (Implementasi – dokumen NRMP).
- 2. Aspek Kepatuhan (bobot 30%),** yaitu evaluasi terhadap SOP terhadap (a) penginputan data monitoring residu pada aplikasi SIMPR, (b) Kriteria pengambilan sampel dan (c) pemenuhan mekanisme jika ditemukan ketidaksesuaian hasil pengujian (*Non Compliance*);
  - 3. Aspek ketercapaian (bobot 40%),** diukur berdasarkan capaian terhadap target sampel di masing-masing Provinsi.

**Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi National Residue Monitoring Plan (NRMP) (%) Triwulan I Tahun 2024**

Nama SS : Meningkatkan kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Tingkat Kualitas Implementasi <i>National Residue Monitoring Plan</i> (NRMP)								
TW I 2024			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target Renstra 2020 - 2024	Target 2024	Realisasi terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Target Renstra 2020 – 2024 (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	-	94	-	-

Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%) merupakan indikator baru ditetapkan pada triwulan III Tahun 2023 yang merevisi Indikator sebelumnya yaitu Indikator kinerja Persentase sampel ikan yang dimonitor kandungan residunya (%). Capaian indikator Kinerja Persentase Tingkat Kualitas Implementasi National Residue Monitoring Plan (NRMP) (%) pada Bulan Maret belum dapat diketahui disebabkan pengukurannya baru diketahui pada akhir tahun.

Indikator kinerja monitoring residu yang dituangkan di dalam Renstra 2020-2024 pada tahun 2024 berjumlah 26.000 sampel, namun target sampel tersebut mengalami penurunan menyesuaikan ketersediaan anggaran Tugas Peantuan di 26 Provinsi. Pada tahun 2024, secara jumlah sampel yang ditargetkan sebanyak 4.000 sampel namun hingga akhir Triwulan I belum terealisasi disebabkan blokir anggaran Tugas Peantuan belum dibuka. Upaya yang dilakukan untuk mendorong capaian sampel monitoring residu yaitu dengan memantau secara intensif perkembangan buka blokir anggaran yang menjadi kewenangan di Kementerian Keuangan.

**Tabel 14. Rincian target dan realisasi sampel monitoring residu di 26 Provinsi pada Triwulan I Tahun 2024**

No	Provinsi	Komoditas	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Aceh	Udang	133	0	0
2	Sumatera Utara	Udang	118	0	0
		Nila	47	0	0
3	Sumatera Barat	Udang	20	0	0
		Nila	38	0	0
4	Riau	Udang	22	0	0
		Patin	55	0	0
5	Jambi	Patin	55	0	0
6	Bangka Belitung	Udang	59	0	0
7	Sumatera Selatan	Udang	109	0	0
		Patin	51	0	0
8	Bengkulu	Udang	42	0	0
9	Lampung	Udang	385	0	0
10	Banten	Udang	46	0	0
11	Jawa Barat	Udang	311	0	0
		Lele	94	0	0
		Nila	67	0	0
12	Jawa Tengah	Udang	125	0	0
		Nila	73	0	0
13	DI Yogyakarta	Udang	42	0	0
14	Jawa Timur	Udang	264	0	0
		Bandeng	72	0	0
		Nila	73	0	0
		Lele	73	0	0
15	Bali	Udang	57	0	0
16	Nusa Tenggara Barat	Udang	423	0	0
17	Kalimantan Barat	Udang	60	0	0
18	Kalimantan Selatan	Udang	74	0	0
19	Kalimantan Tengah	Udang	8	0	0
		Patin	34	0	0
20	Kalimantan Timur	Udang	95	0	0
21	Kalimantan Utara	Udang	76	0	0
22	Sulawesi Tenggara	Udang	322	0	0
23	Sulawesi Tengah	Udang	114	0	0

No	Provinsi	Komoditas	Target	Realisasi	Persentase (%)
24	Sulawesi Selatan	Udang	112	0	0
		Bandeng	67	0	0
25	Sulawesi Barat	Udang	99	0	0
26	Gorontalo	Udang	85	0	0
			<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dalam mendukung tercapainya indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%) telah dilakukan beberapa rencana aksi, seperti : (i) Penyusunan *annual report 2023* dan *National residue monitoring plan* (NRMP) 2024 yang telah disubmit ke Uni Eropa pada tanggal 31 Maret 2023; (ii) Penyusunan Draft Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya terkait Tim Pengendalian Residu yang telah diterbitkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor: 59 Tahun 2024 tentang Tim Pengendalian Residu Nasional Tahun 2024, pada tanggal 5 Februari 2024 (iii) Penyusunan Draft Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya terkait Laboratorium Acuan dan Pengujian Residu yang telah diterbitkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor: 60 Tahun 2024 Tentang Laboratorium Acuan Dan Laboratorium Pengujian Dalam Pelaksanaan Monitoring Residu Nasional Tahun 2024, pada tanggal 5 Februari 2024.

Anggaran yang dialokasikan dalam rangka pelaksanaan pengendalian residu tahun 2024 telah terealisasi sebesar 31.58% dari pagu anggaran sebesar Rp 138.312.000.

#### IKU 9. Indeks Serangan Penyakit Ikan (skala)

Indikator kinerja Indeks serangan penyakit ikan didefinisikan tingkat serangan penyakit ikan pada wilayah tertentu yang ditunjukkan dengan warna hijau, kuning dan merah pada peta sebaran penyakit ikan. Tingkat serangan penyakit ikan yang dimaksud merupakan hasil kegiatan monitoring penyakit ikan yang dilakukan di 34 Provinsi yang dilaporkan oleh operator SSMPI Dinas Perikanan Provinsi melalui SSMPI online. Jumlah sampel penyakit ikan yang dimonitor untuk mengetahui tingkat serangan penyakit ikan sebanyak 755 sampel.

Jenis penyakit ikan yang dimonitoring sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Jenis Penyakit Ikan Yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan. Penghitungan indikator kinerja Indeks serangan penyakit ikan bersifat maximize yaitu indikator kinerja yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi semakin baik.

**Tabel 15. Skala Penentuan Indeks Pengendalian Penyakit Ikan (Skala)**

No	Tingkat Serangan Penyakit Ikan	Kategori Tingkat Serangan penyakit ikan	Warna pada peta sebaran penyakit ikan	Skala
1	Berat	≥ 60 %	Merah	1
2	Sedang	30 – 60 %	Kuning	2

No	Tingkat Serangan Penyakit Ikan	Kategori Tingkat Serangan penyakit ikan	Warna pada peta sebaran penyakit ikan	Skala
3	Ringan	≤ 30 %	Hijau	3

**Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Indeks Serangan Penyakit ikan (Skala) Triwulan I Tahun 2024**

Nama SS : Meningkatkan kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Indeks serangan penyakit ikan (Skala)								
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	-	2	-	-

Monitoring penyakit ikan melalui anggaran Dekonsentrasi pada tahun 2024 dialokasikan kepada 34 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Capaian Indikator Kinerja Indeks serangan penyakit ikan (Skala) Tahun 2024 diperoleh dari hasil pelaksanaan monitoring penyakit ikan yang yang pengukurannya dilakukan secara tahunan.

Monitoring penyakit ikan dilakukan melalui anggaran Dekonsentrasi di 34 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan dilakukan terhadap 17 penyakit ikan yaitu *Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)*, *Hepatopancreatic microsporidiosis caused by Enterocytozoon hepatopenaei (HPM-EHP)*, *Viral encephalopathy and retinopathy (VER/VNN)*, *Enteric septicemia of catfish (ESC)*, *Motile Aeromonas septicemia (MAS)*, *Infection with tilapia lake virus (TiLV)*, *Infection with Megalocytivirus*, *Red sea bream iridoviral disease (RSID)*, *Infection with infectious myonecrosis (IMNV)*, *Infection with white spot syndrome virus (WSSV)*, *Streptococcosis (Streptococcus agalactiae)*, *Streptococcosis (Streptococcus iniae)*, *Infection with koi herpesvirus (KHV)*, *Red sea bream iridoviral disease*, *Fish mycobacteriosis (Mycobacterium fortuitum)*, *Vibriosis* dan *Ichthyophthiriasis (Ichthyophthirius multifiliis)*.

Pelaksanaan surveilan/monitoring penyakit ikan dilakukan di 34 provinsi dengan target sampel yang diambil dan diuji sebanyak 755 sampel. Pada triwulan I belum dilakukan pengambilan sampel monitoring penyakit ikan sehingga realisasi sampel pada triwulan I belum ada. Secara detail jumlah sampel untuk setiap provinsi yang direncanakan pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 17.

**Tabel 17. Rincian Target dan Realisasi Sampel Monitoring Penyakit Ikan di 34 Provinsi pada Triwulan I Tahun 2024**

No	Provinsi	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan I Tahun 2024	Persentase (%)
1	Aceh	27	0	0
2	Sumatera Utara	23	0	0

No	Provinsi	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan I Tahun 2024	Persentase (%)
3	Sumatera Barat	26	0	0
4	Riau	26	0	0
5	Bengkulu	23	0	0
6	Kepulauan Riau	30	0	0
7	Jambi	34	0	0
8	Sumatera Selatan	23	0	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	23	0	0
10	Lampung	30	0	0
11	Banten	8	0	0
12	DKI Jakarta	26	0	0
13	Jawa Barat	56	0	0
14	Jawa Tengah	53	0	0
15	DI Yogyakarta	30	0	0
16	Jawa Timur	30	0	0
17	Bali	15	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	30	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	8	0	0
20	Kalimantan Barat	19	0	0
21	Kalimantan Tengah	8	0	0
22	Kalimantan Timur	19	0	0
23	Kalimantan Utara	19	0	0
24	Kalimantan Selatan	23	0	0
25	Sulawesi Utara	8	0	0
26	Sulawesi Selatan	26	0	0
27	Sulawesi Tengah	15	0	0
28	Gorontalo	23	0	0
29	Sulawesi Tenggara	15	0	0
30	Sulawesi Barat	15	0	0
31	Maluku Utara	11	0	0
32	Maluku	11	0	0
33	Provinsi Papua	11	0	0
34	Papua Barat	11	0	0
<b>Total</b>		<b>755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Permasalahan yang ada pada pencapaian Indikator kinerja Indeks Serangan Penyakit Ikan (skala) adalah anggaran tugas pebantuan masih dalam posisi blokir sehingga pengambilan

sampel monitoring penyakit ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi belum dapat dilaksanakan. Guna menindaklanjuti permasalahan tersebut dilakukan koordinasi dengan bagian program DJPB dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terkait dengan monitoring penyakit ikan melalui anggaran tugas pebantuan. Anggaran yang dialokasikan dalam rangka melakukan pendampingan pengendalian penyakit ikan tahun 2023 sebesar Rp218.312.000 dengan serapan sebesar Rp 31.148.100,- atau 14.27%.

#### **IKU 10. Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%)**

Indikator kinerja mengenai *Antimicrobial Resistance* (AMR) merupakan pelaksanaan mandat Inpres Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia yang telah ditetapkan sejak tahun 2022. Resistansi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan.

Pengendalian Resistansi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resistan. Tingkat resistansi mikroba diperoleh melalui pengujian resistensi antimikroba terhadap isolat bakteri patogen pada sampel ikan yang dilakukan oleh UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Penghitungan terhadap Indikator Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%) dilakukan dengan membandingkan jumlah isolat bakteri target yang dinyatakan resisten terhadap antimikroba target dengan jumlah sampel yang teridentifikasi positif bakteri target. Bakteri yang menjadi target adalah bakteri yang sering menyerang ikan yaitu bakteri *Aeromonas hydrophila*, *Vibrio alginolyticus* dan *Vibrio parahaemolyticus*. Selain itu juga terdapat bakteri lingkungan yang menjadi target yaitu *Escherichia coli*. Antimikroba yang digunakan sebagai target surveilan AMR adalah: Oxytetracyclin, Tetracyclin dan Enrofloksasin.

Pengujian resistensi antimikroba dilaksanakan di 15 UPT- DJPB dengan target indikator kinerja sebesar 35%. Penghitungan indikator kinerja Indikator Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%) diukur pada akhir tahun dan bersifat minimize yang menunjukkan bahwa semakin kecil tingkat resistansi antimikrobanya maka semakin bagus pengendalian resistansi antimikrobanya. Jumlah sampel ikan yang diuji untuk mengetahui hasil uji yang resisten terhadap antimikroba sebanyak 735 sampel.

**Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Persentase Bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%) Triwulan I Tahun 2024**

Nama SS : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Persentase Bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%)								
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020 – 2024
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	-	35	-	-

**Tabel 19. Rincian target dan realisasi sampel surveilan resistensi antimikroba Triwulan I Tahun 2024 di 15 UPT-DJPB**

No	UPT	Target sampel	Realisasi Triwulan I	Prosentase Realisasi (%)
1	Balai Budidaya Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung	59	14	27,73
2	Balai Besar Perikanan Budidaya Perikanan Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi	70	77	110
3	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara	70	49	70
4	Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam	34	9	26,47
5	Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok	35	16	45,71
6	Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon	35	12	34,29
7	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam	35	15	42,86
8	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin	35	21	60
9	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu	21	4	19,05
10	Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo	56	20	35,71
11	Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee	35	8	22,86
12	Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar	35	4	11,43

No	UPT	Target sampel	Realisasi Triwulan I	Prosentase Realisasi (%)
13	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang	56	0	0
14	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem	35	13	37,14
15	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang	124	100	80,65
<b>Total</b>		<b>735</b>	<b>362</b>	<b>49,25</b>

Permasalahan yang ada pada pencapaian Indikator kinerja Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%) pada triwulan I yaitu (1) terdapat UPT DJPB yang belum melakukan pengambilan sampel yaitu BLUPPB Karawang dan (2) hasil uji sensitivitas antimikroba belum dilakukan untuk semua sampel yang teridentifikasi positif bakteri target. Guna menindaklanjuti permasalahan tersebut dilakukan koordinasi dengan UPT DJPB agar melakukan surveilan resistensi antimikroba pada triwulan II. Anggaran yang dialokasikan dalam rangka NSPK bidang AMR tahun 2024 sebesar Rp 250.000.000 dengan realisasi hingga akhir Triwulan I Tahun 2024 masih 0%.

## SS.5. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan

Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup DJPB yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja, yaitu:

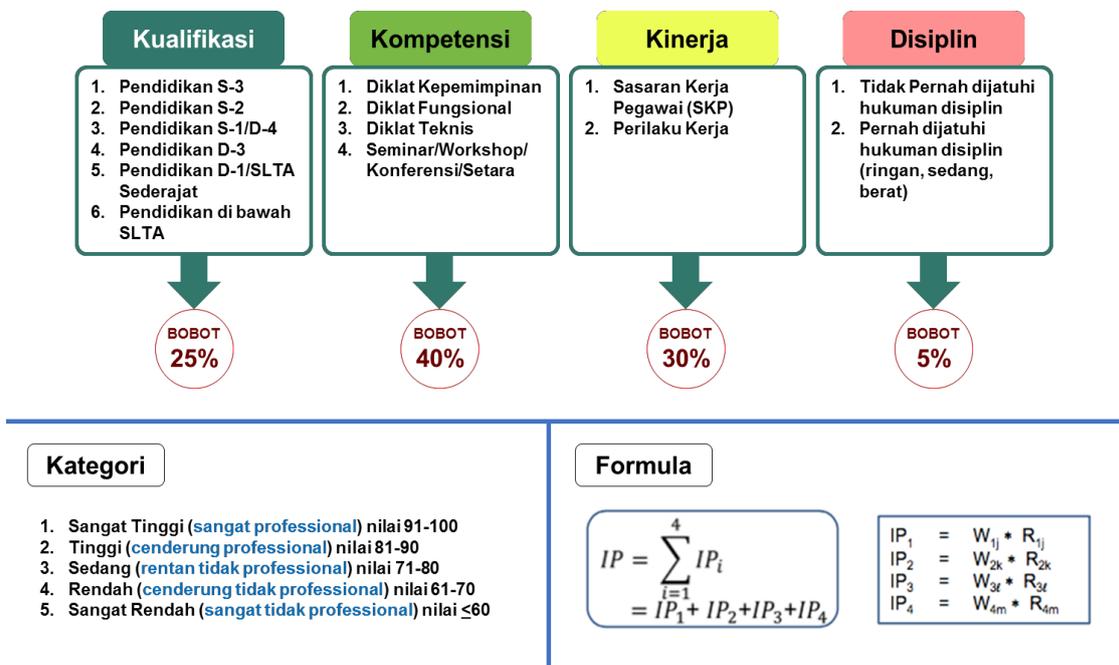
### IKM.11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)

Indikator kinerja IKU ini adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku

kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis);

3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.



**Gambar 8. Formulasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN**

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/workshop/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik. Pengukuran capaian IP ASN dilakukan pada semester 2 dan semester 4 pada tahun berjalan sehingga realisasi berikutnya pada akhir semester.

**Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan I Tahun 2024**

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai)								
TW I 2024			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020 – 2024
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	76	85	-	-

Pada Renstra DJPB 2020-2024, telah dicantumkan target IKU Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai) sebesar 76, namun target yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja menjadi lebih besar yaitu 85. Hasil penilaian IP ASN di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan dilakukan per semester sehingga pada triwulan I belum diketahui capaiannya.

#### IKM. 12. Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai)

Indikator kinerja PM SAKIP merupakan penyesuaian dari Indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi SAKIP yang telah tercantum pada Perjanjian Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan sebelumnya. Perolehan PM SAKIP berdasarkan penilaian LKE pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

Pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu

dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

**Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai) Triwulan I Tahun 2024**

Nama SS Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai)								
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
-	-	-	-	-	34	82	-	-

Pada Triwulan I, indikator Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai) belum tercapai dikarenakan pengukuran indikator dilakukan secara tahunan. Upaya yang dilakukan dalam mencapai target Indikator Kinerja PM SAKIP melalui ketaatan dalam pemenuhan dokumen SAKIP baik terkait dengan dokumen perencanaan maupun pengukuran kinerja. Pada triwulan I, telah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi antara lain : Perjanjian Kinerja, Dialog kinerja (cascading), Rencana Aksi, Manual Indikator Kinerja dan dokumen pengukuran kinerja diantaranya: evaluasi rencana aksi dan laporan kinerja. Dokumen tersebut seluruhnya diupload di aplikasi ESR MenPan maupun ekinerjaku sebagai bukti ketaatan terhadap pemenuhan dokumen SAKIP.

**IKM. 13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)**

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2021 s.d. Triwulan IV Tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang menjadi objek pengawasan.

$$\text{Pengukuran Indikator Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti Tuntas}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang Diberikan}} \times 100\%$$

Cara penghitungannya adalah jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I dibagi jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon 1.

**Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan I Tahun 2024**

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)								
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi Realisasi Triwulan I 2024 thd Triwulan I 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
80	82,61	103,26	100	80	80	80	103,26	103.26

Pada renstra DJPB 2020-2024 terdapat penetapan target IKU Indikator Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%) pada tahun 2024 sebesar 80. Capaian IKU triwulan I diperoleh berdasarkan hasil penghitungan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit berdasarkan Surat Nomor: B. 2517/DJPB.1/HP.620/IV/2024, 16 April 2024 pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 31 Maret 2024 (Triwulan IV Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 31 Maret 2024 (Triwulan I Tahun 2024).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan I Tahun 2024, unit kerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan sebesar 82,61%. Rincian capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) masing-masing Satker disampaikan pada tabel 26 berikut ini.

**Tabel 23. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2024**

No	Unit Kerja	Capaian IKU (%)
1	Setditjen Perikanan Budi Daya	100
2	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	100
3	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	82.61
4	Direktorat Perbenihan	90
5	Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya	100

**IKM.14. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)**

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level 1 dan 2 yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data.

**Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan I Tahun 2024**

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)								
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
94	133,33	141.84	100	106,38	90	94	131,84	104,44

Target IKU Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) telah ditetapkan di dalam Renstra DJPB 2020- 2024, dengan nilai sebesar 90%. Perhitungan penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup DJPB dilakukan atas (i) tingkat *sharing* dokumen mandatory dengan pembobotan 20%; (ii) tingkat keikutsertaan pejabat dan staf dengan pembobotan 40% serta (iii) tingkat keaktifan unit kerja dalam SI-MP dengan pembobotan 40%.

Pada triwulan I tahun 2024, target indikator Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan ikan ditargetkan angka 94 dengan realisasi 133,33 atau sebesar 141,84%. Upaya yang dilakukan

terhadap tercapainya target diatas melalui: penyebarluasan informasi menggunakan pladform Portal Collaboration Office yang diakses melalui <https://portal.kkp.go.id> (dengan mekanisme dan perhitungan yang disampaikan melalui Memorandum Nomor: 1996/DJPB.1/TU.210/VIII/2023, 30 Agustus 2023 tentang Penyampaian Sosialisasi Manajemen Pengetahuan Periode Triwulan III Lingkup KKP. Penggunaan aplikasi tersebut menggantikan aplikasi Bitrix yang telah habis lisensinya pada tanggal 25 Juni 2023.

Berkaitan dengan perbandingan pencapaian IKU Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan ikan Triwulan I telah diinformasikan melalui Nota Dinas : 1310/SJ.7/TU.210/IV/2024, 2 April 2024 perihal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar KKP Triwulan I Tahun 2024.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa Eselon II Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan telah melampaui target Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) dan nilai yang sama juga diperoleh Eselon II Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya kecuali Sekretariat jenderal Perikanan Budi Daya dengan perolehan 133,33%.

**IKM.15. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)**

Indikator ini untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis lingkup satker Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, berupa hasil evaluasi data pemanfaatan bantuan pemerintah Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 25. Capaian Indikator Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan I Tahun 2024**

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Capaian Indikator Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)								
TW I 2024			Realisasi TW I 2024	Perbandingan Realisasi TW IV 2023 thd TW IV 2022 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
-	-	-	-	-	80	80	-	-

IKU Indikator Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) telah ditetapkan di dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024 dengan target pada tahun 2023 sebesar 80%. Indikator Kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Pada Tahun 2024, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya. Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah

Indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan;
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Penghitungan capaian IKU Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) merupakan tahunan sehingga capaian pada triwulan I Tahun 2024 belum diketahui.

#### IKM.16. Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)

Indikator kinerja persentase layanan perkantoran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan tahun 2023, Capaian indikator kinerja tersebut terdiri dari kegiatan arsiparis, rekapitulasi kehadiran pegawai, pengelolaan keuangan, pengelolaan BMN, layanan tata usaha dan pengelolaan SDM Aparatur. Penghitungan capaian indikator tersebut diperoleh berdasarkan persentase pengukuran terhadap 6 aspek ketatausahaan dibandingkan dengan jumlah aspek yang diukur setiap triwulannya. Pengukuran dilakukan terhadap 6 aspek dengan bobot pengukuran sebagai berikut:

- Nilai pengawasan arsiparis = 60%
- Kehadiran pegawai = 85%
- Pengelolaan Keuangan = 95%
- Pengelolaan BMN = 95%
- Layanan tata usaha = 73%
- Pengelolaan SDM Aparatur = 72%

**Tabel 26. Capaian Indikator Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan I Tahun 2024**

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)								
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
80	99,32	124,15	99,42	99,89	-	80	124,15	-

IKU Indikator Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) belum ditetapkan di dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024. disebabkan Indikator tersebut baru ditetapkan pada tahun 2023 dengan capaian indikator tersebut pada triwulan I tahun 2024 sebesar 124,15%. Perolehan angka capaian tersebut dapat dilihat pada data yang disajikan pada Tabel 27 berikut.

**Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan I Tahun 2024**

No	Aspek Penilaian	Target (%)	Realisasi (%)
1	Nilai pengawasan arsiparis	60	0
2	Kehadiran pegawai	85	92,27
3	Pengelolaan Keuangan	95	100
4	Pengelolaan BMN	95	100
5	Layanan tata usaha	73	100
6	Pengelolaan SDM Aparatur	72	0
	TOTAL	85	99,32

Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja persentase layanan perkantoran pada Triwulan I tahun 2024, meliputi:

- Nilai Pengawasan Arsiparis**  
 Nilai pengawasan arsiparis diperoleh melalui penilaian jumlah arsip dinamis aktif, arsip in aktif, dan usul musnah. Penilaian dilakukan satu tahun sekali oleh Biro Umum sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kepegawaian**  
 Aspek ini dihitung berdasarkan kehadiran pegawai lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan. Jumlah Pegawai Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan pada tahun 2024 sebanyak 52 (lima puluh dua) orang yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) orang PNS, 2 (dua) orang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 11 (sebelas) orang PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Kehadiran pegawai dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang hadir dibandingkan dengan target kehadiran yang diharapkan, instrumen untuk mengetahui kehadiran pegawai pada Triwulan I tahun 2024 menggunakan aplikasi e-presensi mobile KKP.

**Tabel 28. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024**

No	Tim Kerja	Jumlah Pegawai (Orang)	Efektif Kerja (Hari)	Target Hadir (OH)	Realisasi Kehadiran			Persentase Kehadiran	
					Hadir di Kantor	Dinas Luar	Tugas Belajar		
1	Direktur KKI	1	58	58	23	35	0	58	100,00%
2	Prasarana Kawasan Budi Daya	10	58	540	337	156	40	533	98,70%
3	Pembangunan Kawasan Budi Daya	13	58	754	488	239	0	727	96,42%

No	Tim Kerja	Jumlah Pegawai (Orang)	Efektif Kerja (Hari)	Target Hadir (OH)	Realisasi Kehadiran				Persentase Kehadiran
					Hadir di Kantor	Dinas Luar	Tugas Belajar	Jumlah	
4	Pengendalian Penyakit Ikan Dan Resistensi Antimikroba	10	58	540	324	135	58	517	95,74%
5	National Residu Monitoring Plan (NRMP) Dan Norma, Standar, Prosedur Kriteria (NSPK)	7	58	406	305	91	0	396	97,54%
6	Dukungan Manajemen	12	58	696	462	221	0	683	98,13%
<b>Total</b>		<b>53</b>		<b>2.994</b>	<b>1.939</b>	<b>877</b>	<b>98</b>	<b>2.914</b>	
<b>Persentase (%)</b>									<b>97,33%</b>

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kehadiran masih dibawah dari target kehadiran 100% yang dikarenakan terdapat beberapa pegawai yang sakit dan cuti. Gambaran jumlah pegawai yang tidak hadir, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 29. Rekapitulasi Ketidakhadiran Pegawai Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024**

No	Kelompok/Bidang	Jumlah Pegawai	Ketidakhadiran (hari)					Persentase ketidakhadiran (%)
			Sakit	Cuti	Izin	Alpa	Jumlah (Hari)	
1	Direktur KKI	1	0	0	0	0	0	0,00%
2	Prasarana Kawasan Budi Daya	10	0	7	0	0	7	1,30%
3	Pembangunan Kawasan Budi Daya	13	0	27	0	0	27	3,58%
4	Pengendalian Penyakit Ikan Dan Resistensi Antimikroba	10	0	23	0	0	23	4,26%
5	National Residu Monitoring Plan (NRMP) Dan Norma, Standar, Prosedur Kriteria (NSPK)	7	3	7	0	0	10	2,46%
6	Dukungan Manajemen	12	7	5	0	1	13	1,87%
<b>Total</b>		<b>53</b>	<b>10</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>80</b>	
<b>Persentase (%)</b>								<b>2,67%</b>

- **Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan Keuangan pada Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan terdiri dari pertanggungjawaban Penggantian Uang Persediaan, Pembayaran LS Bendahara dan Pembayaran LS pihak ketiga. Pada Triwulan I Tahun 2024, pengelolaan keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan dapat dirinci pada Tabel 30.

**Tabel 30. Rincian Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Triwulan I Tahun 2024**

No	Proses Pembayaran	Kuantitas (Dokumen)	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
1	<b>Jumlah SPM -LS</b>			
	SPM LS Bendahara	17	736.621.000	100,00%
	SPM LS Pihak Ketiga	11	758.010.000	100,00%
2	<b>Jumlah GUP</b>	0	-	100,00%
3	<b>Jumlah TUP</b>	0	-	100,00%
<b>Jumlah Dokumen Pengajuan Pembayaran</b>		28	1.494.631.000	
<b>Prosentase (%)</b>				100,00 %

- **Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**

Pengelolaan BMN Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan mencakup pencatatan dan pendetailan BMN serta transaksi keluar pada aplikasi SAKTI Tahun 2024. Data BMN yang dilakukan transaksi keluar antara lain barang persediaan dan barang yang diserahkan ke masyarakat. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 31. Data Transaksi Persediaan Untuk Periode Triwulan I Tahun 2024**

No	Akun	Kuantitas	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
1	Barang Konsumsi (unit)	1	1.794.950.000	100%
2	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	100%
3	Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	100%
<b>Prosentase (%)</b>				100,00 %

- **Layanan Tata Usaha**

Layanan tata usaha Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan yang dihitung sebagai bagian capaian dalam mendukung indikator kinerja persentase layanan perkantoran tahun 2023 berupa layanan yang menunjang penyelenggaraan rapat. Pada Triwulan I tahun 2024, telah direalisasikan kegiatan tersebut dengan rincian pada tabel 32 berikut.

**Tabel 32. Layanan Rapat Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024**

No	Tim Kerja	Permintaan (kali)	Realisasi (kali)	Persentase
1	Prasarana Kawasan Budi Daya	11	11	100,00%
2	Pembangunan Kawasan Budi Daya	1	1	100,00%
3	Pengendalian Penyakit Ikan Dan Resistensi Antimikroba	8	8	100,00%
4	National Residu Monitoring Plan (NRMP) Dan Norma, Standar, Prosedur Kriteria (NSPK)	1	1	100,00%
5	Dukungan Manajemen	0	0	100,00%
<b>Total</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	
<b>Persentase</b>				<b>100,00%</b>

**• Pengelolaan SDM Aparatur**

Pengelolaan SDM Aparatur Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan dinyatakan dalam Indeks Pengelolaan SDM Aparatur diukur berdasarkan komponen :

- Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses mutasi (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan Non JF Bidang Perikanan Budidaya, Pindah PNS, Pencantuman Gelar, Peninjauan Masa Kerja dan Pemberhentian PNS) yang ditetapkan dibanding dengan jumlah usulan proses mutasi dari unit kerja.
- Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses ketatausahaan (Kartu Pegawai, Kartu Istri, dan Kartu Suami) yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi.
- Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel.

Capaian Indeks diatas akan diketahui pada akhir tahun yang pengukurannya dilakukan oleh Bagian Pengelolaan SDM Aparatur- Seditjen Perikanan Budi Daya.

**IKM.17. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%)**

Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) tidak ditetapkan di dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024 sehingga indikator tersebut merupakan indikator kinerja yang baru dikelola pada Tahun 2023. Penanggung Jawab Indikator Kinerja tersebut berada di Kelompok Sarana dan Prasarana dan Kelompok Penataan Kawasan.

Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) merupakan Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah mendapatkan kartu KUSUKA secara elektronik. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha kelautan dan perikanan (pembudidaya ikan) yang dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2024, dengan baseline data hasil pendataan terakhir tahun 2023 (31 Desember 2023).

Perhitungan indikator Perhitungan indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan

yang Terintegrasi KUSUKA (%) berdasarkan Jumlah Kusuka yang mendapat bantuan dan terdaftar KUSUKA dibandingkan dengan pelaku usaha budi daya ikan yang menerima bantuan yang hasil pengukurannya baru diketahui pada Triwulan IV.

**Tabel 33. Capaian Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) Triwulan I Tahun 2024**

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%)								
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
-	-	-	-	-	-	91	-	-

Target Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) difokuskan pada kegiatan bantuan pemerintah, berupa: excavator dan PITAP dengan target KUSUKA di masing-masing bantuan pemerintah, yaitu: 120 orang dan 80 orang.

#### IKM.18. Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (Lokasi)

Indikator kinerja Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%) merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan tahun 2023 sehingga indikator tersebut tidak dicantumkan di dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024. Seiring dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 bahwa setiap K/L wajib menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta adalah langkah-langkah perbaikan IGT yang terdapat di berbagai Kementerian/Lembaga melalui proses Kompilasi data IGT yang ada, Integrasi data IGT dengan data IGD, dan Sinkronisasi antar data IGT. Hal tersebut mendasari perlunya dilakukan pengelolaan data IGT lingkup KKP yang telah dihasilkan.

Indikator kinerja Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan yang pengukurannya dihitung berdasarkan jumlah rencana aksi yang diselesaikan dibandingkan dengan total kegiatan rencana aksi yang dipersentasekan. Indikator kinerja tersebut diukur secara tahunan yang seluruhnya telah tercapai sebesar 100%.

**Tabel 34. Capaian Indikator Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (Lokasi) Triwulan I Tahun 2024**

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%)								
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
-	-	-	-	-	-	1	-	-

**IKM.19. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)**

Indikator kinerja persentase realisasi keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan didefinisikan sebagai tingkat serapan anggaran di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan. Penghitungan capaian indikator kinerja tersebut diperoleh berdasarkan persentase realisasi anggaran Direktorat Kawasan dan kesehatan ikan dibandingkan dengan pagu anggaran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan.

Alokasi awal anggaran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan pada tahun 2024 sebesar 429.050.000.000 yang diimplementasikan untuk mencapai Indikator Kinerja di setiap unit kerja yang berada di bawah Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, dengan rincian: (a) Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan sebesar Rp1.350.000.000; (b) Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat sebesar Rp. 139.200.000.000; (c) Sarana Perikanan Budidaya di UPT sebesar Rp5.800.000.000; (d) Klaster kawasan di Lokasi Major Project Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng sebesar Rp 1.500.000.000; (e) Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) sebesar Rp2.500.000.000; (f) Infrastruktur budidaya udang yang ditingkatkan – IISAP sebesar Rp66.600.000.000; dan (g) Budidaya Udang Yang Terintegrasi-ISF sebesar Rp212.100.000.000.

Pada bulan Maret 2024 terdapat revisi pagu menjadi Rp418.602.250.000 dengan rincian (a) Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan sebesar Rp902.250.000 b) Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat sebesar Rp. 129.200.000.000; (c) Sarana Perikanan Budi Daya di UPT sebesar Rp5.800.000.000; (d) Klaster kawasan di Lokasi Major Project Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng sebesar Rp 1.500.000.000; (e) Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) sebesar Rp2.500.000.000; (f) Infrastruktur budi daya udang yang ditingkatkan – IISAP sebesar Rp66.600.000.000; dan (g) Budi daya Udang Yang Terintegrasi-ISF sebesar Rp212.100.000.000. Revisi pagu tersebut dimaksudkan untuk realokasi anggaran ke Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB) Karawang untuk mendukung pengembangan modelling nilai salin.

Sejak Januari 2024 hingga saat ini masih terdapat kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) terhadap pagu anggaran untuk mencapai Indikator Kinerja Budi Daya Udang Yang Terintegrasi-ISF sebesar Rp 212.100.000.000 dan Infrastruktur Budi Daya Udang yang Ditingkatkan – IISAP sebesar Rp 100.000.000 sehingga kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan sehingga pagu

anggaran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan yang dapat dilaksanakan hanya Rp 206.402.250.000,-

**Tabel 35. Capaian Indikator Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024**

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator: Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)								
TW I 2024			Realisasi TW I 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW I 2024 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
2	3.86	193	1.75	220		98	3.93	-

**Tabel 36. Capaian Indikator Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024**

No	Output	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
1	PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	902.250.000	99.900.100	802.349.900
2	QEG	Bantuan Peralatan/Sarana	129.200.000.000	512.232.500	128.687.767.500
3	RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	5.800.000.000	0	5.800.000.000
4	RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	70.500.000.000	7.349.123.408	63.150.876.592
Total			<b>206.402.250.000</b>	<b>7.961.256.008</b>	<b>198.440.993.992</b>
Persentase Realisasi				3,86%	

Capaian Indikator kinerja Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan sebesar 3.86% diperoleh dari pelaksanaan kegiatan : (i) **Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan** sebesar Rp 99.900.100 meliputi : NSPK bidang pengendalian residu dan NSPK bidang penyakit ikan, (ii) **Bantuan peralatan/sarana** sebesar Rp 512.232.500 berupa excavator yang disalurkan ke masyarakat, dan (iii) Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 7.349.123.408, antara lain meliputi : (i) Penyusunan DED kawasan tambak, (ii) Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP), (iii) Infrastructure Improvement of Shrimp Aquaculture Project (IISAP) dan (iv) PMO.

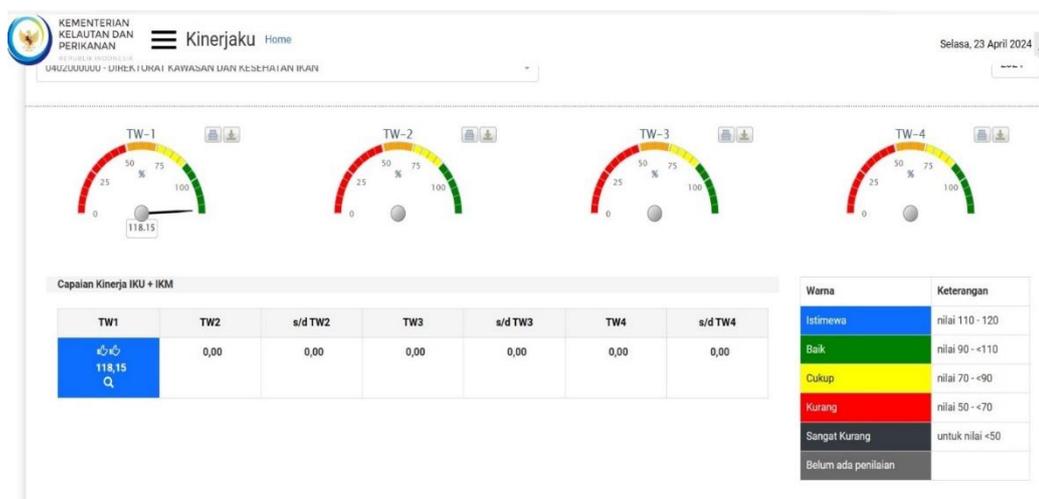
## BAB IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan merupakan salah satu unit eselon II dilingkup Ditjen Perikanan Budi Daya yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kawasan dan kesehatan ikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra DJPB dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dan Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024 menyajikan capaian Indikator Kinerja selama periode Januari – Maret 2024. Selanjutnya terkait dengan capaian Indikator Kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan dalam menilai keberhasilan.

Berdasarkan target tahunan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan tahun 2024, dari total 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja pendukung sasaran strategis, sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja telah melampaui target tahunan yang telah ditetapkan atau >100%, 1 (satu) Indikator kinerja yang capaiannya dibawah target tahunan dan 15 (lima belas) indikator kinerja yang belum dapat diukur capaiannya pada Triwulan I. Seluruh capaian Indikator kinerja Triwulan I Tahun 2024 juga digambarkan melalui Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) pada aplikasi “Kinerjaku” yang memuat capaian Indikator Kinerja pada Triwulan I mencapai nilai angka “Istimewa”



Gambar 7. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan I Tahun 2024

## B. Saran

Pencapaian nilai kinerja organisasi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan merupakan kontribusi dukungan kinerja dari 5 (lima) Tim Kerja lingkup Direktorat dan *Stakeholder* terkait, sehingga diharapkan agar capaian nilai organisasi yang telah memenuhi target maupun melampaui target tahunan maupun target triwulan I Tahun 2024 dapat dipertahankan pada Triwulan berikutnya.

Kendala dan permasalahan yang ditemui selama pencapaian kinerja organisasi baiknya dikomunikasikan dan dikoordinasikan secara intensif guna menghasilkan strategi/upaya yang mampu mendorong percepatan pencapaian kinerja. Dukungan seluruh pegawai lingkup Direktorat kawasan dan Kesehatan Ikan melalui tercapainya Indikator Kinerja Individu (IKI) yang penilaiannya dilakukan setiap triwulan juga perlu diperhatikan dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam penyusunan laporan kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024, diketahui bahwa dari 19 (sembilan belas) Indikator kinerja baru 5 (lima) Indikator kinerja yang dapat diukur pencapaiannya sedangkan capaian 14 indikator kinerja lainnya belum dapat diukur pada Triwulan I. Adapun permasalahan terkait capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2024 diantaranya: Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, belum seluruh hasil review pembangunan BUBK, PITAP dan ISF yang belum seluruhnya tuntas ditindaklanjuti sehingga perlu upaya dalam penyelesaian hasil review terkait.

Diharapkan Laporan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan I Tahun 2024 ini dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan sehingga dapat dijadikan titik balik bagi perbaikan kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan pada Triwulan berikutnya.